

TUGAS AKHIR
PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KABUPATEN KEBUMEN



Disusun Oleh:
Revita Hazna
2022125744

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta

TUGAS AKHIR PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN KEBUMEN

Disusun oleh:

Revita Hazna

2022125744

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi

Diploma Tiga Akuntansi



Drs. Dwi Haryono Wiratno,
M.M., Ak., CA.



Dr. Evi Grediani, S.E., M.Sc., Ak.,
C.A., S.A.S.

Mengetahui,

Politeknik YKPN

Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA

**PERNYATAAN ORISINALITAS
TUGAS AKHIR**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Politeknik YKPN dan atau suatu Perguruan Tinggi lain, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan/plagiat, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Ahli Madya) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Mahasiswa



Revita Hazna

2022125744

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kebumen. IPM merupakan indikator komprehensif yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Pemerintah Daerah didorong untuk terus meningkatkan capaian IPM guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui optimalisasi penggunaan DAK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung prioritas pembangunan di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data *time series* selama lima tahun, yaitu dari tahun 2020-2024. Data diperoleh dari Badan Pusat statistik (BPS), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kebumen. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan didukung uji asumsi klasik, uji F, dan koefisien determinasi menggunakan *software* SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap IPM di Kabupaten Kebumen, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DAK berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Khusus, Pembangunan Daerah, Kabupaten Kebumen

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kebumen” yang disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma Tiga Akuntansi di Politeknik YKPN Yogyakarta.

Penulisan laporan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan dengan adanya dukungan, bantuan, doa, dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Suharno dan Ibu Nur Rohmah yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya di setiap langkah dalam proses pendidikan yang ditempuh penulis.
2. Almarhumah Ibu Siti Nafi'ah selaku bude, serta Bella Nadya Annisa dan Azzahrah Hawa sebagai kakak sepupu yang tidak pernah lelah untuk memberikan semangat dan dukungan nyata, baik secara moril maupun materiil selama penulis menempuh pendidikan hingga tugas akhir ini selesai.
3. Keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung setiap langkah yang penulis jalani.
4. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA. selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Dr. Evi Grediani, S.E., M.Sc., Ak., C.A., S.A.S. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis, sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Politeknik YKPN Yogyakarta yang telah memberikan tambahan pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

7. Syavira Annastasya, Nur Rofingah, Mahda Salsabela Irrawan, Charista Louis Nismara Yoseph, Nisrina Salsabila Alifah, dan Rosalina Widyastuti, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya serta bersedia menjadi tempat berkeluh kesah sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
8. Ria Apmida Boru Sitorus, Shintya Fitrianis, Helga Yumna Fadhila, Viony Monica Ratu, Dafina Caesa Nurmalita, Syifa Salsabila, Angeli Lilia Dewi, dan Maria Yohana Betto Koten, selaku sahabat penulis selama masa pendidikan di Politeknik YKPN Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan selama proses perkuliahan, dan dengan tulus penuh kesabaran bersedia direpotkan dalam berbagai hal.
9. Pihak instansi terkait, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. Bantuan dan kerja sama yang diberikan sangat berperan penting dalam kelancaran proses penelitian.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini terdapat beberapa kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan, waktu, dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran akan membantu penulis dalam menyempurnakan penelitian ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Kebumen, 29 Mei 2025

Penulis

Revita Hazna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penulisan Tugas Akhir.....	1
1.2 Cakupan Pembahasan.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Pengembangan Hipotesis	23
2.3 Kerangka Konseptual	28
BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	29
3.1 Metode Penelitian.....	29
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	29
3.3 Populasi dan Sampel	29
3.4 Sumber Data.....	30
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	31
3.6 Metode Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN	36
4.1 Profil BPKPD Kabupaten Kebumen	36
4.2 Statistik Deskriptif	40
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.4 Analisis Regresi	46
4.5 Hasil Uji F	47
4.6 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	47

4.7 Pembahasan Hasil Uji Penelitian	48
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	51
5.3 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Dimensi IPM Indonesia	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh DAK terhadap IPM.....	24
Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel Operasional	32
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif	41
Tabel 4. 2 Uji Normalitas.....	42
Tabel 4. 3 Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4. 4 Uji Normalitas Model Akhir	44
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
Tabel 4. 6 Uji Autokorelasi.....	45
Tabel 4. 7 <i>Coefficients</i>	46
Tabel 4. 8 Hasil Uji F.....	47
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indikator IPM	1
Gambar 1. 2 IPM Indonesia	2
Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen	4
Gambar 1. 4 IPM Kabupaten Kebumen.....	4
Gambar 1. 5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen	5
Gambar 1. 6 Realisasi DAK Kabupaten Kebumen.....	7
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen.....	38

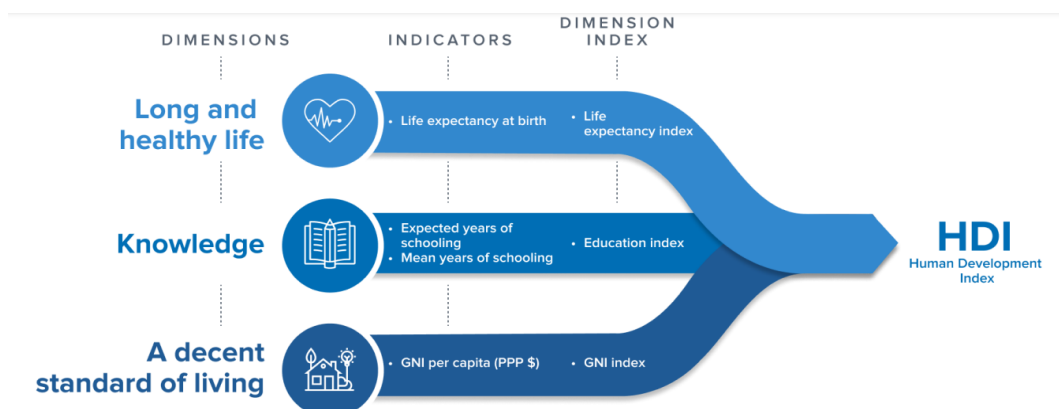
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan Tugas Akhir

Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Padahal hakikatnya pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam menyejahterakan rakyat. Di negara berkembang perhatian utama pembangunan terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan, di mana pertumbuhan yang paling sering dijadikan pembicaraan adalah pertumbuhan ekonomi (Lestari *et al.*, 2021)

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) pada tahun 1990 sebagai metode pengukuran utama untuk menilai pencapaian dalam pertumbuhan manusia. Dalam perhitungannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup beberapa indikator utama yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Aspek kesehatan diukur berdasarkan angka harapan hidup, sedangkan pendidikan dinilai melalui rata-rata lama sekolah bagi penduduk berusia di atas 25 tahun serta harapan lama sekolah bagi anak yang baru memasuki usia sekolah (*United Nations Development Programme*, 2025)



Gambar 1. 1 Indikator IPM

Sumber: UNDP

Indonesia menunjukkan konsistensi dalam peningkatan IPM di setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,75% per tahun (Badan Pusat Statistik, 2024). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada publikasinya dalam laporan IPM Indonesia tahun 2024, menjelaskan bahwa laju pertumbuhan IPM nasional pada tahun 2024 mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan adanya peningkatan capaian pembangunan manusia dari aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak secara lebih signifikan. Gambar 1.2 berikut merupakan data mengenai pertumbuhan IPM di Indonesia selama tahun 2020-2024.



Gambar 1. 2 IPM Indonesia

Sumber: BPS

Peningkatan IPM nasional tersebut dapat terjadi karena membaiknya indikator pembentuk IPM. Seluruh dimensi pembentuk IPM di Indonesia baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak menunjukkan tren peningkatan. Namun, peningkatan paling signifikan terlihat pada indikator pengetahuan dan standar hidup layak. Hal tersebut dapat mencerminkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan serta pendapatan masyarakat Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024). Tabel 1.1 berikut menunjukkan pertumbuhan indikator IPM di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Dimensi IPM Indonesia

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Panjang dan Hidup Sehat (UHH) saat Lahir	tahun	73.37	73.46	73.70	73.93	74.15
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12.98	13.08	13.10	13.15	13.21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8.48	8.54	8.69	8.77	8.85
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	11,013	11,156	11,479	11,899	12,341

Sumber: BPS

Pertumbuhan IPM di Indonesia tersebut dapat dilihat selalu konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena dimensi pendukung IPM di Indonesia mengalami peningkatan pula per tahunnya. Dengan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pembangunan manusia di Indonesia mengalami tren yang positif dalam lima tahun terakhir. IPM tersebut mencerminkan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan penduduk Indonesia demi keberlangsungan pembangunan masyarakat yang meningkat positif.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang sedang berkembang dan memiliki potensi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Untuk memahami pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen dalam lima tahun terakhir, dapat diperhatikan melalui grafik pada gambar 1.3 berikut yang bersumber dari BPS Kabupaten Kebumen.



Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen penting untuk dianalisis guna menilai kualitas hidup masyarakat dan menjadi fokus studi lanjutan terhadap IPM. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas penduduk melalui tiga dimensi utama, yaitu angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang layak (*United Nations Development Programme*, 2025). Data IPM Kabupaten Kebumen memberikan gambaran mengenai sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Grafik pada gambar 1.4 berikut menyajikan perkembangan IPM Kabupaten Kebumen dalam lima tahun terakhir yang bersumber dari BPS Kabupaten Kebumen.

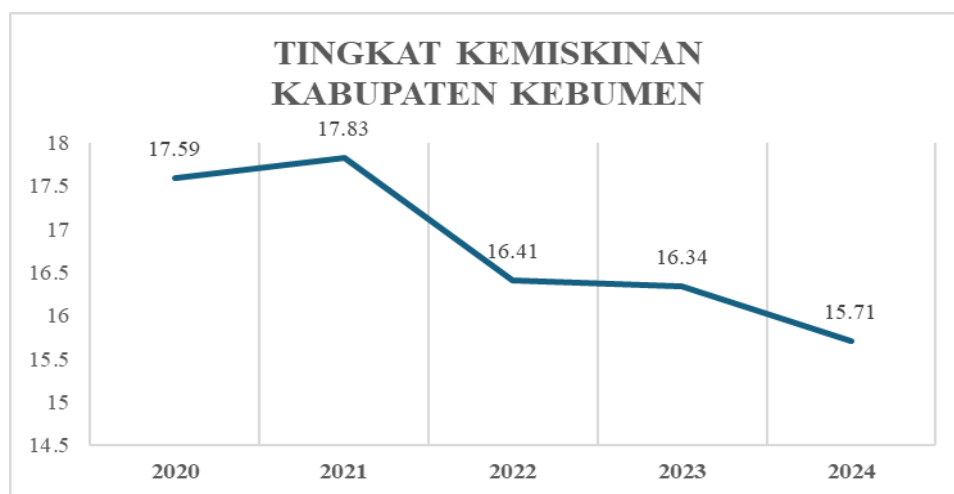


Gambar 1. 4 IPM Kabupaten Kebumen

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen

Data pada gambar 1.4 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Setiap tahunnya, nilai IPM terus mengalami kenaikan secara konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen. Dengan tren positif tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kebumen semakin meningkat.

Selain memperhatikan kualitas hidup masyarakat melalui IPM, penting pula untuk meninjau aspek lain yang turut memengaruhi pencapaian pembangunan tersebut, salah satunya adalah tingkat kemiskinan. Menurut UNDP dalam publikasi laporan IPM Indonesia Tahun 2023 oleh BPS (Badan Pusat Statistik, 2024), menyebutkan bahwa pembangunan manusia juga harus menyentuh sejumlah masalah sosial, salah satunya pengentasan kemiskinan. Selain itu, dalam publikasi tersebut, BPS juga menyebutkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung memiliki angka IPM yang rendah, hal tersebut dikarenakan rendahnya capaian pada indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, dalam analisis ini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen digunakan sebagai variabel kontrol untuk pengkajian yang lebih objektif. Grafik pada gambar 1.5 berikut menyajikan tren angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen dalam lima tahun terakhir yang bersumber dari BPS Kabupaten Kebumen dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

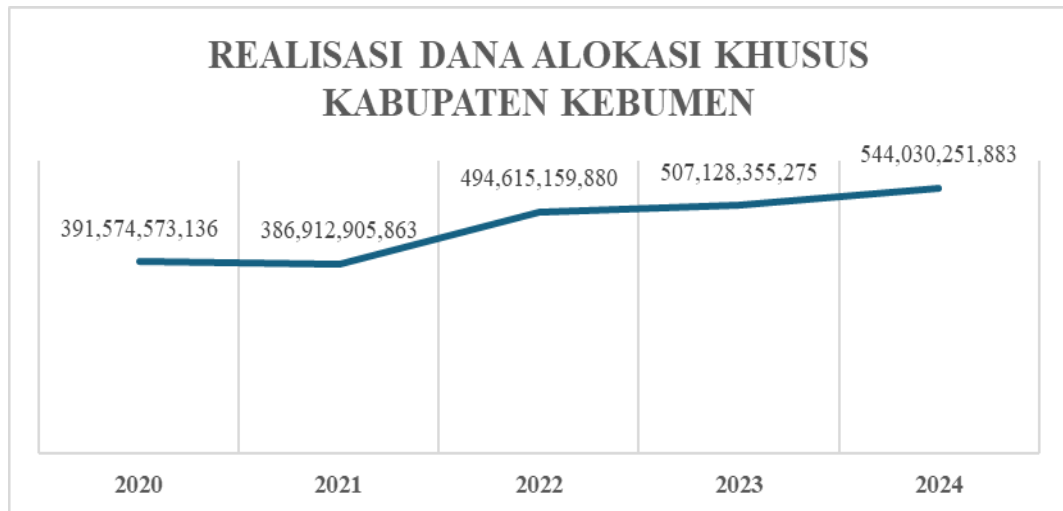


Gambar 1. 5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen

Untuk mendukung pencapaian IPM yang meningkat, diperlukan intervensi kebijakan fiskal dengan tepat sasaran, salah satunya yaitu dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK yang dialokasikan untuk pendanaan urusan tertentu yang menjadi prioritas nasional, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang di mana ketiga hal tersebut merupakan indikator utama pembentuk IPM (*United Nations Development Programme, 2025*). DAK merupakan salah satu bentuk dana transfer untuk Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN. DAK merupakan bagian dari dana perimbangan yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan khusus di tingkat Pemerintah Daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat tiga standar yang digunakan dalam menentukan kebutuhan khusus tersebut. Standar tersebut mencakup kebutuhan yang tidak dapat dihitung melalui formula Dana Alokasi Umum (DAU), kebutuhan yang sejalan dengan prioritas nasional, serta kebutuhan pendanaan untuk pelestarian lingkungan alam yang dikelola oleh daerah penghasil (Ridho, 2023).

Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah turut menerima alokasi DAK setiap tahunnya, yang kemudian diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penentuan alokasi tersebut merujuk pada kriteria umum, khusus, dan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan DAK oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih merata. Berikut merupakan grafik realisasi DAK Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen (BPKPD).



Gambar 1. 6 Realisasi DAK Kabupaten Kebumen

Sumber: Pemerintah Daerah dan BPKPD Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar 1.6 tersebut, dapat diperhatikan bahwa realisasi DAK di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp391.574.573.136,00 pada tahun 2020, menjadi Rp386.912.905.863,00 pada tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan pada tahun tersebut, tren realisasi DAK pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan pola yang konsisten meningkat. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang lebih optimal dari Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memanfaatkan dana transfer pusat untuk mendukung program-program pembangunan prioritas di berbagai sektor.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berperan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk suatu daerah, yang pada akhirnya tercermin dalam angka IPM. Hubungan antara IPM dan DAK di suatu daerah menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Oleh karena itu, analisis mengenai bagaimana alokasi dan realisasi pemanfaatan DAK berkontribusi terhadap pembangunan manusia di suatu daerah menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut.

1.2 Cakupan Pembahasan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis menetapkan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kebumen?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi akademik bagi akademisi, khususnya dalam mengkaji pengaruh DAK terhadap IPM, dan memperkaya literatur mengenai pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atas Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, terkait dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAK guna mendorong optimalisasi pembangunan manusia di wilayah tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan pendekatan baru untuk memajukan kesejahteraan manusia. Menurut UNDP, pendekatan pembangunan manusia merupakan suatu proses yang menekankan pada perluasan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, bukan semata-mata pada peningkatan kekayaan ekonomi. Pendekatan ini berorientasi pada manusia sebagai inti pembangunan, dengan fokus pada perluasan pilihan, kesempatan, dan kebebasan individu dalam menjalani kehidupan yang bernilai bagi mereka.

Pendekatan pembangunan manusia menurut UNDP tersebut juga dapat dipahami sebagai suatu proses yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kehidupan individu secara holistik, tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Dalam pendekatan ini, manusia diposisikan sebagai pusat dari setiap upaya pembangunan, di mana keberhasilan tidak hanya dilihat dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai, melainkan dari sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap berbagai alternatif kehidupan yang layak. Pembangunan manusia menekankan pentingnya memperluas ruang gerak individu dalam menentukan arah hidupnya melalui ketersediaan pilihan, peluang untuk berkembang, serta kebebasan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup masing-masing.

Dalam bukunya yang berjudul *Development as Freedom*, Amartya Sen (1999) mengembangkan pendekatan yang dikenal dengan Pendekatan Kapabilitas, pendekatan tersebut menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya dapat diukur melalui indikator ekonomi seperti pertumbuhan pendapatan, tetapi lebih penting lagi adalah kemampuan atau kapabilitas individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Kapabilitas

mencerminkan kebebasan seseorang untuk memilih, bertindak, dan menjadi sesuai dengan apa yang mereka hargai dalam hidupnya.

Dengan pendekatan kapabilitas tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan sejatinya tidak cukup jika hanya dinilai dari indikator ekonomi seperti pendapatan. Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana individu memiliki kapasitas dan kebebasan untuk menjalani kehidupan yang mereka pandang berharga. Dalam hal ini, kapabilitas mencerminkan peluang nyata yang dimiliki seseorang untuk membuat pilihan hidup yang bermakna, baik dalam hal bertindak, berkontribusi, maupun menjadi pribadi yang sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang diyakininya. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan manusia secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek material, tetapi juga pada perluasan kebebasan dan kesempatan dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Dalam karyanya yang berjudul *Reflection on Human Development*, Mahbub ul Haq (1995) menyampaikan bahwa esensi dari pembangunan manusia terletak pada upaya untuk memperluas ragam pilihan yang dapat diakses oleh setiap individu. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi semata tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Konsep pembangunan manusia menurut Mahbub ul Haq tersebut menitikberatkan pada pentingnya memperluas berbagai pilihan hidup yang tersedia bagi setiap individu, sehingga mereka memiliki keleluasaan untuk menentukan arah hidup yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam pandangan ini, kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan nasional, melainkan dari seberapa besar individu memiliki akses terhadap kesempatan untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan yang layak, menikmati layanan kesehatan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan manusia menekankan bahwa indikator ekonomi saja tidak cukup untuk merepresentasikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan berbagai teori dan pendekatan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia tidak semata-mata berfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi individu. Hal ini disebabkan karena kesejahteraan seseorang tidak dapat diukur dari satu dimensi saja, melainkan harus dilihat juga dari berbagai indikator lain yang mencerminkan sejauh mana kemajuan pembangunan telah dicapai oleh masing-masing individu.

2.1.2 Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan instrumen pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui pengaturan penerimaan baik pajak maupun non-pajak dan pengeluaran (belanja pemerintah dan transfer dana). Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, pemerataan pendapatan, dan pengendalian inflasi.

Dalam pandangan N. Gregory Mankiw (2006) melalui karyanya *Principle of Economics*, kebijakan fiskal diartikan sebagai instrumen pemerintah dalam mengelola pengeluaran dan penerimaan negara, khususnya melalui mekanisme perpajakan, guna memengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan ini diterapkan untuk mencapai tujuan makroekonomi, antara lain menurunkan tingkat pengangguran melalui kebijakan ekspansif, mengendalikan inflasi dengan kebijakan kontraktif, serta menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Menurut Madjid, Kemenkeu RI 2012 (dalam DJKN, 2017) kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah dalam mengatur belanja negara dan sistem perpajakan melalui instrumen fiskal dengan tujuan memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif, tergantung pada kondisi ekonomi yang dihadapi.

Instrumen fiskal terdiri atas dua komponen utama, yaitu pengeluaran pemerintah dan penerimaan dari perpajakan. Melalui pengaturan keduanya, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan, serta mendukung pemerataan pembangunan. Salah satu bentuk konkret

implementasi dari kebijakan fiskal di Indonesia adalah melalui transfer dana ke daerah, termasuk DAK.

Dalam bukunya yang berjudul *The Theory of Public Finance*, Richard Abel Musgrave (1959) mengemukakan bahwa kebijakan fiskal memiliki tiga peran utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi mengacu pada peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak mampu disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan guna menciptakan pemerataan dan keadilan sosial melalui kebijakan redistribusi. Sementara itu, fungsi stabilisasi berfokus pada upaya menjaga kestabilan perekonomian, termasuk pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, dan penciptaan stabilitas ekonomi makro.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memanfaatkan beberapa instrumen, salah satunya adalah kebijakan fiskal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar kebijakan fiskal menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis pengaruhnya terhadap pembangunan. Berikut merupakan beberapa konsep dasar dalam kebijakan fiskal (Sudarmanto, *et al.*, 2024):

1. Pengeluaran publik, merujuk pada total dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai kegiatan dan program yang bersifat publik. Pemerintah memanfaatkan belanja ini guna mendukung pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai program sosial lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pendapatan publik, seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak atas properti, serta pendapatan yang berasal dari kepemilikan aset negara. Dana yang diperoleh melalui pendapatan publik ini dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara, termasuk pengeluaran pemerintah dan penyediaan layanan publik lainnya.

3. Pajak, merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal yang berperan sebagai sumber utama penerimaan negara. Melalui pemungutan pajak, pemerintah memperoleh dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai bentuk pengeluaran publik. Jenis-jenis pajak yang dipungut meliputi pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak atas kepemilikan properti, serta berbagai jenis pajak lainnya.
4. Subsidi, merupakan bentuk finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor atau industri tertentu sebagai upaya untuk mendorong perkembangan sektor tersebut atau mencapai tujuan kebijakan tertentu. Bantuan ini dapat disalurkan secara langsung, seperti pemberian dana tunai, maupun secara tidak langsung, misalnya melalui pemberian insentif pajak.
5. Defisit anggaran, terjadi ketika total pengeluaran pemerintah melebihi jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti menurunkan tingkat pengeluaran, meningkatkan penerimaan negara, atau melakukan pinjaman guna menutupi kekurangan anggaran.
6. Surplus anggaran, terjadi apabila penerimaan pemerintah melebihi jumlah pengeluaran yang dilakukan dalam suatu periode anggaran. Kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk melunasi utang negara, memperkuat cadangan keuangan pemerintah, atau dialokasikan untuk mendanai tambahan belanja publik.

Secara keseluruhan, konsep dasar kebijakan fiskal mencakup berbagai komponen penting yang saling berkaitan dalam mendukung peran pemerintah dalam mengelola perekonomian. Pendapatan publik menjadi sumber utama pembiayaan negara yang diperoleh melalui instrumen seperti pajak, sementara pengeluaran publik mencerminkan penggunaan dana tersebut untuk menyediakan layanan dan fasilitas bagi masyarakat. Pajak berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan pendapatan negara, sedangkan subsidi digunakan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mendorong sektor-sektor strategis. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dapat menghasilkan defisit anggaran, yang memerlukan

strategi penyesuaian atau pembiayaan tambahan, atau sebaliknya menghasilkan surplus anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keuangan negara. Pemahaman menyeluruh terhadap elemen-elemen ini menjadi landasan penting dalam menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi, pemerintah menerapkan dua jenis kebijakan fiskal utama, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kedua jenis kebijakan ini memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda, tergantung pada apakah pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi atau justru menekan laju inflasi dan defisit anggaran. Berikut merupakan dua jenis kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah (Sudarmanto, *et al.*, 2024):

1. Kebijakan fiskal ekspansif

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya saat terjadi resesi atau peningkatan angka pengangguran. Melalui peningkatan belanja negara dan/atau penurunan pajak, pemerintah berupaya meningkatkan daya beli masyarakat agar konsumsi dan aktivitas ekonomi kembali tumbuh.

2. Kebijakan fiskal kontraktif

Kebijakan ini diterapkan untuk menahan laju pertumbuhan ekonomi, terutama saat terjadi peningkatan inflasi yang terlalu cepat. Berbanding terbalik dengan kebijakan fiskal ekspansif, pendekatan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara menaikkan pajak dan mengurangi belanja pemerintah.

Kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan manusia, terutama instrumen belanja negara yang diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut pandangan Musgrave (1959), pengelolaan fiskal yang efektif tidak hanya berfungsi dalam menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks pembangunan manusia, kebijakan fiskal mampu memperluas akses individu terhadap layanan dasar yang esensial, serta menciptakan lingkungan

sosial dan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, belanja pemerintah yang teralokasi secara tepat dapat memperkuat kapabilitas individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga instrumen sosial yang krusial dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Salah satu bentuk desentralisasi fiskal di Indonesia yaitu melalui transfer Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat perbedaan kebutuhan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab pelaksanaan DAK masih belum optimal, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah (Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI, 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tertulis bahwa DAK merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK tersebut berupa DAK fisik, DAK nonfisik, dan Hibah ke Daerah. DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan membantu kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK nonfisik merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk daerah tertentu yang bertujuan membantu pendanaan kegiatan khusus nonfisik yang menjadi urusan daerah (Pambudi, 2021)

DAK fisik terbagi menjadi beberapa fokus, dan pada setiap fokusnya terdapat beberapa bidang pembangunan. Menurut penjelasan pada UU HKPD, DAK fisik disesuaikan dengan memuat hal yang berhubungan dengan percepatan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu.

Adapun beberapa topik yang sesuai dengan fokus tersebut dalam APBN Tahun 2023 adalah sebagai berikut (Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI, 2022) :

1. DAK fisik mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, dan Bidang Sanitasi
2. DAK fisik mendukung konektivitas daerah, yaitu Bidang Jalan
3. DAK fisik mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, topik tersebut terdiri dari tiga tematik, yaitu:
 - a. Tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas
 - b. Tematik penanganan kawasan kumuh
 - c. Tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi
4. DAK fisik mendukung ketahanan pangan yang terdiri dari dua tematik, yaitu:
 - a. Tematik pengembangan food estate
 - b. Tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan sektor pertanian, perikanan, dan hewan

Berdasarkan Undang Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), DAK nonfisik merupakan bagian DAK yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Beberapa jenisnya antara lain:

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dialokasikan untuk pendanaan belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. BOS terdiri atas:
 - a. BOS Reguler, diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat, yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen)
 - b. BOS Kinerja, digunakan untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah

2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pendanaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu
3. Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan Kesetaraan, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan melalui jalur nonformal
4. Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, terdiri atas:
 - a. Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah dikerahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan bagi guru ASN Daerah
 - b. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru ASN Daerah yang belum bersertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - c. Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah diberikan kepada guru ASN Daerah yang mengajar di daerah khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya
5. Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Museum dan Taman Budaya, digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya
6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), ditujukan untuk mendukung delapan area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
7. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana

8. Dana Pelayanan Kepariwisata, ditujukan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas, amenitas, dan atraksi pariwisata di 19 Destinasi Pariwisata dalam mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan
9. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) ditujukan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan, serta layanan bantuan dan pendampingan hukum serta Inkubasi Wirausaha
10. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan
11. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA), ditujukan untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas
12. Dana Fasilitas Penanaman Modal (DFPM), ditujukan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal
13. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), ditujukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi pasar dan memfasilitasi layanan publik khususnya informasi pertanian dan pemenuhan operasional bagi pelayanan peternakan dan kesehatan hewan
14. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SKIM), ditujukan untuk mendanai kegiatan bidang Industri Kecil Menengah (IKM) yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam Sentra IKM

Dana hibah kepada daerah ditujukan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembagian dana hibah ke daerah secara rinci berdasarkan sumber pendanaannya terdiri dari tiga macam, yaitu pinjaman luar negeri yang diterushibahkan, hibah luar negeri yang diterushibahkan, dan penerimaan dalam negeri yang dihibahkan. Program hibah ke daerah tersebut ditujukan untuk mendukung bidang perhubungan, penyediaan infrastruktur daerah, dan penanganan kondisi bencana (Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI, 2022)

Dengan demikian, DAK memainkan peran penting dalam meningkatkan standar layanan dasar termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Selain sebagai alat untuk mendanai pembangunan daerah. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada seberapa baik DAK digunakan. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi DAK di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan terhadap peningkatan IPM Kabupaten Kebumen, maka penting untuk mengkaji hal tersebut dalam penelitian ini.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pada Tahun 1990, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diciptakan oleh UNDP sebagai metrik utama untuk mengevaluasi pencapaian pertumbuhan manusia. IPM memperhitungkan sejumlah metrik penting yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti kesehatan, Pendidikan, dan pendapatan per kapita. Angka harapan hidup digunakan untuk mengevaluasi kesehatan, sedangkan rata-rata jumlah tahun pendidikan untuk orang di atas 25 tahun serta jumlah tahun pendidikan yang diharapkan untuk anak-anak yang baru mulai bersekolah digunakan untuk mengukur pendidikan (United Nations Development Programme, 2025)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah serta dinyatakan dalam suatu angka indeks. Dasar perhitungan IPM adalah komponen-komponen dasar dasar kualitas hidup manusia, seperti angka harapan hidup serta

kesehatan, ilmu pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Badan Pusat Statistika (BPS) membagi kategori capaian IPM menjadi empat klasifikasi, yaitu sangat tinggi (nilai IPM di atas 80), tinggi (nilai IPM di antara 70 dan 80), sedang (nilai IPM di antara 60 dan 70), dan rendah (nilai IPM di bawah 60) (Nashshar & Mulyana, 2022)

IPM pada daerah tertentu merupakan indeks pengukuran yang menunjukkan besarnya tingkat kemajuan suatu daerah dengan dilihat dari pembangunan sumber daya manusia daerah tersebut. Dengan IPM tersebut, secara aplikatif akan menjadi landasan konseptual bagi daerah untuk mengapresiasi suatu keberhasilannya dalam kinerja memajukan pembangunan yang telah dilaksanakan (Fahrurrozi, et al., 2023) IPM merupakan indikator strategis yang seringkali digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara keseluruhan di suatu wilayah. Dalam konteks tersebut, IPM didefinisikan sebagai hasil dari program pembangunan sumber daya manusia yang sudah dilaksanakan di suatu daerah dan kemajuan dari program tersebut dalam suatu periode akan diimplementasikan dalam angka IPM (Sari, Winarni, & Amali, 2021)

IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar dalam kehidupan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat dideskripsikan dengan angka Umur Harapan Hidup (UHH), yaitu rata-rata lamanya (tahun) yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. Pengetahuan diukur oleh Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia di atas 25 tahun dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) digambarkan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan ditempuh oleh penduduk sejak umur tertentu. Standar hidup yang layak dihitung dari pengeluaran per kapita yang sudah disesuaikan oleh setiap daerah. IPM sendiri dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran (Lukito, 2022)

Berikut merupakan penjelasan mengenai indikator IPM (Azfirmawarman, Magriasti, & Yulhendri, 2023):

1. Indeks harapan hidup, merupakan rerata jangka waktu yang dapat dijalani oleh seseorang dalam hidupnya, dan biasa dikenal dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk pengukuran AHH menggunakan metode tak langsung dengan mengambil data dari perhitungan Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Standar oleh UNDP dimanfaatkan dalam memperkirakan nilai maksimal dan nilai minimal kemungkinan rentang usia seseorang untuk menghasilkan indeks, dengan batas atas di usia 85 tahun dan batas bawah di usia 25 tahun.
2. Indeks pendidikan, memperhitungkan rata-rata tahun yang dihabiskan di dunia pendidikan serta nilai melek huruf. Adapun batas usia yang ditetapkan untuk menghitung rentang masa sekolah yakni 15 tahun. Sementara itu, untuk batas minimum dan maksimum untuk menunjukkan angka melek huruf masing-masing berada di 100 dan 0. Penduduk dengan 100% mahir dalam membaca serta menulis akan dicerminkan dengan angka 100, sedangkan untuk penduduk yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, akan dicerminkan dengan angka 0.
3. Indeks standar hidup layak, menggambarkan mutu kehidupan seseorang dan kriteria ini didefinisikan sebagai ukuran kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk dengan terbentuk dari hasil perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. BPS menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita untuk menentukan indeks standar hidup layak tersebut.

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara disebut sebagai negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM dapat melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, dalam hal harapan hidup, intelektualitas, dan standar hidup yang layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk

memperoleh pendapatan yang cukup, kesehatan, dan pendidikan yang memadai (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah, 2022)

Pada publikasi BPS dalam (Azfirmawarman, Magriasti, & Yulhendri, 2023) memaparkan beberapa manfaat IPM adalah sebagai berikut:

1. IPM merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
2. IPM menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara atau wilayah
3. IPM dimanfaatkan untuk menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) karena datanya yang cukup strategis bagi Indonesia

Pada tahun 2010, UNDP melakukan revisi yang cukup besar dan disebut dengan era baru pembangunan manusia. Dalam metode baru ini, UNDP mengubah indikator melek huruf menjadi harapan lama sekolah, dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita menjadi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Selain itu, penggunaan rata-rata geometrik untuk menggabungkan tiga dimensi utama IPM juga merupakan salah satu perbedaan utama antara pendekatan ini dengan pendekatan sebelumnya. BPS telah menerapkan pendekatan metode baru tersebut untuk menghitung IPM di Indonesia sejak tahun 2014 (BPS, 2019)

Tujuan dari pendekatan dengan metode baru tersebut adalah untuk menyajikan pandangan yang lebih adil dan seimbang tentang pencapaian kemajuan manusia. Skor IPM tidak akan terlalu tinggi jika salah satu komponen sangat rendah karena rata-rata geometrik dapat mencegah satu dimensi mendominasi dimensi lainnya. Selain itu, setiap indikator dinormalisasi ke skala 0 hingga 1 menggunakan batas minimum dan maksimum global yang telah ditetapkan untuk menghitung IPM. Dengan mempertahankan dasar-dasar IPM tersebut sekaligus, dapat meningkatkan akurasi dan sensitivitas terhadap ketidaksetaraan antar dimensi, formulasi IPM yang baru tersebut juga dianggap lebih realistis dalam menggambarkan situasi pembangunan manusia (Fajar, 2021)

Berdasarkan penelitian oleh (Nabila, Fitri, & Arum, 2023) tentang faktor-faktor yang memengaruhi IPM berdasarkan Kota/Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2022 dengan variabel independen harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, mendapatkan hasil bahwa variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah. Penelitian tersebut mendapatkan hasil sebesar 0,999 pada pengujian koefisien determinasi atau R-Square.

Pada penelitian lain oleh (Mayapada, Yanti, & Syarifuddin, 2022) mengenai tingkat kepentingan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi IPM di Indonesia menunjukkan bahwa di antara variabel pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan umur harapan hidup saat lahir, variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap IPM adalah pengeluaran per kapita. Sedangkan angka harapan lama sekolah memiliki pengaruh terendah di antara variabel tersebut. Namun, variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM di Indonesia.

IPM adalah salah satu indikator pembangunan multidimensi yang merupakan alat utama untuk menilai keberhasilan inisiatif pengembangan sumber daya manusia. IPM menunjukkan seberapa baik kinerja suatu wilayah dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sangat penting untuk memahami komponen-komponen IPM tersebut. IPM menjadi variabel dependen dalam penelitian ini, yang akan diteliti untuk mengetahui sejauh mana pengeluaran DAK untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan standar hidup penduduk di Kabupaten Kebumen.

2.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan dari apa yang akan dikaji serta merupakan pernyataan yang akan diterima untuk sementara sebagai kebenaran dengan berdasarkan logika, teori-teori ilmu pengetahuan, dan penelitian-penelitian terdahulu dalam konteks masalah yang

sama (Abdullah, 2015). Tabel 2.1 berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh DAK terhadap IPM di berbagai daerah di Indonesia.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh DAK terhadap IPM

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Saswatata & Parju, 2022)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Semarang	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, memperoleh hasil bahwa pengaruh DAK terhadap IPM menghasilkan koefisien regresi dan tingkat signifikansi, dengan demikian secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan atas pengaruh DAK terhadap IPM. Selanjutnya, peneliti menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
2.	(Silalahi, Arief, & Indrafana, 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintahan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021	Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan, memperoleh hasil nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ pada pengaruh DAK terhadap IPM Pemerintahan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh terhadap IPM di wilayah tersebut.
3.	(Arifin & Azizah, 2022)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana	Hasil pengujian pengaruh DAK terhadap IPM memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,039 <$

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020)	0,05 yang dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh terhadap IPM.
4.	(Ina & Hudang, 2024)	Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, memperoleh hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap IPM dengan peningkatan sebanyak 1 (satuan) akan meningkatkan IPM sebesar 0,0054.
5.	(Wati, Ridwansyah, & Dewi, 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2019	Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dilakukan, memperoleh hasil bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung, peneliti menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena DAK fisik mendominasi pengalokasian DAK oleh pemerintah yang kemudian direalisasikan untuk pendanaan kebutuhan sarana dan prasarana.
6.	(Rizkiyah & Anitasari, 2023)	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan	Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, memperoleh hasil bahwa DAK berpengaruh positif

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Manusia Kabupaten Bojonegoro	terhadap IPM Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010-2019. Peneliti menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena anggaran DAK dimanfaatkan untuk kegiatan yang relevan dengan prioritas nasional dalam meningkatkan fokus untuk kualitas sumber daya manusia yang linear dengan indikator IPM.
7.	(Saputra, <i>et al.</i> , 2023)	Dampak Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2022	Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, memperoleh hasil bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Barat. Penulis menyimpulkan jika semakin besar anggaran DAK oleh pemerintah, maka pembangunan manusia di daerah tersebut akan semakin tinggi.
8.	(Fadli, Rosnawintang, & Apoda, 2024)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM. Berdasarkan uji Eviews dihasilkan nilai probabilitas sebesar 0,140 > 0,05 dengan pola hubungan negatif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu pada tabel 2.1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa DAK pada beberapa daerah tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian oleh (Wati, Ridwansyah, & Dewi, 2023) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2019” menghasilkan nilai t hitung pada uji t lebih kecil dari nilai t tabel ($1,415 < 2,00404$), dan dengan nilai signifikansi lebih besar dari nilai α ($0,163 > 0,05$) yang artinya variabel DAK tidak memiliki pengaruh terhadap variabel IPM. Selain itu, pada penelitian oleh (Fadli, Rosnawintang, & Apoda, 2024) yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara” memperoleh hasil uji menggunakan Eviews dengan nilai probabilitas sebesar $0,140 > 0,05$ dan pola hubungan negatif, oleh karena itu disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM.

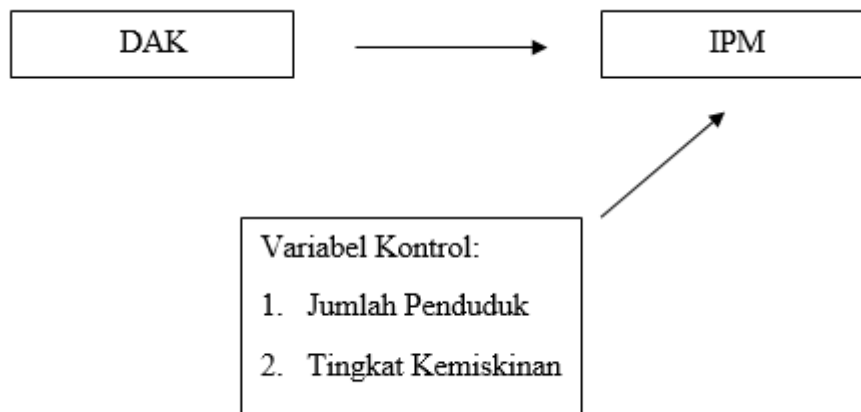
Pada penelitian terdahulu di tabel 2.1 tersebut juga terdapat beberapa penelitian yang memperoleh hasil bahwa DAK berpengaruh terhadap IPM. Seperti pada penelitian oleh (Ina & Hudang, 2024) dengan meneliti pengaruh DAK terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh hasil positif dengan peningkatan sebanyak 1 (satuan) akan meningkatkan IPM sebesar 0,0054. Kemudian pada penelitian oleh (Rizkiyah & Anitasari, 2023) yang dilakukan dengan populasi penelitian di Kabupaten Bojonegoro menghasilkan adanya pengaruh positif DAK terhadap IPM. Sementara itu, pada penelitian oleh (Saswatata & Parju, 2022) dengan populasi penelitian Kota Semarang, (Silalahi, Arief, & Indrafana, 2023) dengan populasi penelitian Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, (Arifin & Azizah, 2022) dengan populasi penelitian Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, dan (Saputra, *et al.*, 2023) dengan populasi penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, masing-masing menghasilkan uji data yang berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar $< 0,05$.

Berdasarkan permasalahan pokok serta tinjauan pustaka yang telah dipaparkan oleh penulis, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_0 : DAK tidak berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Kebumen
- H_1 : DAK berpengaruh positif terhadap IPM di Kabupaten Kebumen

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti berdasarkan teori-teori yang relevan dan temuan-temuan sebelumnya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dibangun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai keterkaitan antara DAK terhadap IPM. Selain itu, variabel kontrol seperti jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan turut disertakan dalam penelitian ini guna melihat sejauh mana pengaruh faktor eksternal terhadap kualitas pembangunan manusia.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: diolah

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder untuk menguji pengaruh DAK terhadap IPM di Kabupaten Kebumen. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian serta kausalitas hubungan penelitiannya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis dengan pengumpulan data penelitian yang dapat dikaji dengan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Data sekunder merupakan data yang perolehannya didapat dari sumber lain, baik organisasi, lembaga, badan, maupun institusi (Abdullah, *et al.*, 2022).

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber data penelitian, yang menjadi tujuan pengamatan oleh penulis. Subjek pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen serta Badan Pusat Statistik, sebagai entitas sumber data keuangan daerah dan pembangunan manusia selama tahun 2020-2024. Objek penelitian merupakan aspek yang akan diteliti dan menjadi fokus utama dalam pengumpulan serta analisis data. Objek pada penelitian ini adalah hubungan antara DAK dengan IPM yang akan dianalisis untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau unit analisis sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam penelitian. Populasi mencakup keseluruhan objek yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sesuai dengan penelitian yang akan diambil. (Abdullah, *et al.*, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data tahunan mengenai DAK dan IPM di Kabupaten Kebumen.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik populasi tersebut. Karena adanya populasi yang cukup luas, dan dengan keterbatasan dana, tenaga, dan waktu yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi untuk melakukan penelitian (Abdullah, *et al.*, 2022). Adapun sampel pada penelitian ini adalah data DAK dan IPM Kabupaten Kebumen tahun 2020 – 2024. Untuk menjamin ketersediaan data yang komprehensif dan konsisten, serta untuk menunjukkan tren jangka menengah alokasi DAK dan pencapaian IPM, rentang waktu lima tahun diterapkan dalam penelitian ini. (Sugiyono, 2017) menegaskan bahwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan dan keterwakilan data, pengumpulan data berdasarkan periode waktu tertentu dapat diselesaikan. Selain itu, data runtun waktu yang singkat masih dapat dianalisis secara statistik untuk menentukan korelasi kausalitas (Gujarati & Porter, 2009).

3.4 Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Klasifikasi data menurut sumbernya dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari mengolah data yang sudah tersedia oleh lembaga terkait (Abdullah, *et al.*, 2022). Pada penelitian ini, memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Data penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 – 2024 serta Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 – 2024.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen dan laporan resmi instansi terkait dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu data DAK dan IPM Kabupaten Kebumen tahun 2020 – 2024. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen atau arsip resmi yang

sudah tersedia (Sugiyono, 2017). Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh teori, konsep, dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh DAK terhadap IPM sebagai landasan dalam penelitian ini.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel menjelaskan konsep variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, digunakan satu variabel dependen, satu variabel independen, dan dua variabel kontrol. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (Abubakar, 2021). IPM Kabupaten Kebumen merupakan variabel dependen dalam penelitian ini yang didefinisikan sebagai ukuran komposit untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan manusia (*United Nations Development Programme*, 2025). Data IPM Kabupaten Kebumen diperoleh dari BPS Kabupaten Kebumen dan diukur dengan satuan indeks skala 0 sampai dengan 100.

Variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Abubakar, 2021). Realisasi DAK Kabupaten Kebumen menjadi variabel independen pada penelitian ini. DAK merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan membiayai kegiatan khusus yang termasuk dalam prioritas nasional. DAK diukur dalam satuan juta rupiah dan data DAK diperoleh dari Pemerintah Daerah serta BPKPD Kabupaten Kebumen.

Variabel kontrol merupakan variabel yang dampaknya terhadap variabel dependen dapat diketahui oleh peneliti (Abubakar, 2021). Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan sebagai variabel kontrol. Jumlah penduduk merupakan total individu yang tinggal dan menetap pada suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu yang diukur dalam satuan jiwa. Data jumlah penduduk Kabupaten Kebumen diperoleh dari BPS Kabupaten Kebumen. Variabel kontrol selanjutnya adalah tingkat kemiskinan, merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan oleh BPS yaitu sebesar Rp454.652 (2020),

Rp472.525 (2021), Rp505.469 (2022), Rp550.458 (2023), dan Rp582.932 (2024). Tingkat kemiskinan diukur dengan satuan persen, dan data tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen diperoleh dari BPS Kabupaten Kebumen. Variabel jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan dapat memengaruhi IPM, sehingga relevan sebagai kontrol agar hasil dari penelitian pengaruh DAK terhadap IPM menjadi lebih akurat dan tidak bias.

Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel Operasional

Variabel	Kode	Pengukuran	Sumber
Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Ukuran komposit yang mencakup indikator kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan manusia	BPS
Dana Alokasi Khusus	DAK	Realisasi DAK Kabupaten Kebumen	Pemda dan BPKPD
Jumlah Penduduk	JP	Total individu yang tinggal dan menetap dalam kurun waktu tertentu	BPS
Tingkat Kemiskinan	TK	Persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan oleh BPS	BPS

Sumber: diolah

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS versi 30.0 untuk Windows sebagai alat untuk menganalisis dan menguji data guna mendapatkan hasil penelitian dari pengaruh DAK terhadap IPM di Kabupaten Kebumen.

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik memiliki tujuan untuk memastikan dan menjamin jika variabel bebas tidak memiliki sifat bias serta memiliki varian yang minimum. Adapun pengujian asumsi klasik tersebut terdiri dari beberapa pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Nashshar & Mulyana, 2022).

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan metode yang digunakan untuk memeriksa apakah residual regresi mengikuti distribusi yang normal. Pada uji ini, penulis menggunakan model Shapiro–Wilk karena data yang digunakan merupakan data kecil, yaitu $n < 50$. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$, maka residual dianggap memiliki distribusi yang normal (Pratama, *et al.*, 2025).

3.6.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi di antara variabel bebas. Model regresi dapat dikatakan bebas multikolinearitas jika memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 (Palagan, Fisher, & Darto, 2018).

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah terjadi ketidaksamaan varian residual dalam model regresi. Jika varian residual tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varian tersebut berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Glejser digunakan untuk menganalisis heteroskedastisitas tersebut. Apabila hasil uji memperoleh nilai $p\text{-value} > 0,05$ dapat dinyatakan bahwa model regresi tersebut tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas dan dikatakan baik (Palagan, Fisher, & Darto, 2018).

3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW-test) yang bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Apabila uji tersebut memperoleh hasil di antara -4 sampai dengan +4, maka dapat dikatakan jika data dalam penelitian bebas dari adanya autokorelasi (Palagan, Fisher, & Darto, 2018).

3.6.2 Analisis Regresi

Regresi merupakan metode yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel bebas atau variabel independen sebagai variabel penyebab terhadap variabel terikat atau variabel dependen sebagai variabel akibat. Analisis regresi dapat mengetahui bagaimana variabel memengaruhi variabel lain dan untuk mengetahui bentuk-bentuk dari hubungan tersebut. Terdapat dua macam analisis regresi, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear sederhana merupakan analisis yang hanya terdiri dari dua variabel saja, yaitu satu variabel dependen, dan satu variabel independen. Sedangkan analisis regresi linear berganda merupakan metode analisis yang terdiri dari dua atau lebih variabel, yaitu satu variabel dependen, dan dua atau lebih variabel independen (Sahir, 2021).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis regresi linear berganda karena terdapat satu variabel independen dengan dua variabel kontrol yang akan menjadi variabel penyebab atas variabel dependen. Namun demikian, pemilihan model akhir akan disesuaikan dengan hasil uji asumsi klasik yang apabila hasil uji tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap variabel kontrol, maka analisis dapat disederhanakan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Rumus analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y: Variabel Dependen (Indeks Pembangunan Manusia)

α : Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Variabel Dana Alokasi Khusus

β_2 : Koefisien Regresi Variabel Jumlah Penduduk

β_3 : Koefisien Regresi Variabel Tingkat Kemiskinan

X_1 : Dana Alokasi Khusus

X_2 : Jumlah Penduduk

X_3 : Tingkat Kemiskinan

e : Error

3.6.3 Uji secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengukur seluruh variabel secara simultan atau bersama-sama. Terdapat dua kriteria dalam pengujian ini, yaitu jika p-value < 0.05 atau f-hitung lebih besar dari f-tabel, maka variabel independen dalam penelitian berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen (Sahir, 2021).

3.6.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan memerhatikan nilai Adjusted R-Squared yang menunjukkan seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika angka semakin mendekati 100% dapat disimpulkan bahwa pengaruh atas variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar (Sahir, 2021).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil BPKPD Kabupaten Kebumen

4.1.1 Gambaran Umum Instansi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen adalah lembaga teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, serta aset daerah yang berada dalam kewenangan pemerintah setempat. BPKPD berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan keuangan untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, BPKPD juga berperan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta administrasi keuangan yang mendukung pelaksanaan program daerah.

Sepanjang perkembangannya, BPKPD Kebumen telah mengalami beberapa kali perubahan nama dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Pada awalnya, instansi ini dikenal sebagai Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) pada periode 1982 – 2003. Kemudian, pada 2004 – 2009, namanya berubah menjadi Kantor Pendapatan Daerah (KAPENDA). Selanjutnya, pada 2010 – 2011, instansi ini berganti nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Perubahan kembali terjadi pada 2011 – 2021, di mana instansi ini beroperasi dengan nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sejak 2022 hingga sekarang, instansi ini resmi menggunakan nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

4.1.2 Fungsi dan Tugas Pokok BPKPD Kebumen

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berperan dalam mendukung Bupati untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan, yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah. Berikut merupakan fungsi dari BPKPD Kebumen:

1. Membuat rancangan dan program untuk penatausahaan keuangan, pendapatan, dan kekayaan daerah;
2. Membuat kebijakan dalam penatausahaan keuangan, pendapatan, dan kekayaan daerah;
3. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan, pendapatan, dan kekayaan daerah;
4. Mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan di bidang pendapatan, kekayaan daerah, dan pengelolaan keuangan;
5. Menyelesaikan prosedur administrasi Badan;
6. Mengendalikan kegiatan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) instansi;
7. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diamanatkan oleh Bupati.

4.1.3 Visi dan Misi BPKPD Kebumen

a) Visi

Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat.

b) Misi

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegritas.

```

graph TD
    KB[KEPALA BADAN] --> S[SEKRETARIAT]
    KB --> B1[BIDANG ANGGARAN]
    KB --> B2[BIDANG PERENCANAAN DAN PENGAWASAN]
    KB --> B3[BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH]
    KB --> B4[BIDANG PENGHASILAN DAN PEMELIHARAAN PENDAPATAN DAERAH]

    S --> SBKU[SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN]
    S --> SBK[SUBBAGIAN KEUANGAN]
    S --> SB3KJF[SUBBAGIAN YANG BAWAH 3 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]

    B1 --> B1A[SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN]
    B1 --> B1B[SUBBIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN]
    B1 --> B1C[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]

    B2 --> B2A[SUBBIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH]
    B2 --> B2B[SUBBIDANG ANALISA DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH]
    B2 --> B2C[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]

    B3 --> B3A[SUBBIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH]
    B3 --> B3B[SUBBIDANG PELAYANAN, PENSILOSTANSIAAN BARANG MILIK DAERAH]
    B3 --> B3C[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]

    B4 --> B4A[SUBBIDANG PEKAGIHAN DAN PEMELIHARAAN PENDAPATAN DAERAH]
    B4 --> B4B[SUBBIDANG PEKAGIHAN PAJAK DAERAH]
    B4 --> B4C[SUBBIDANG PEMERIKSAAN PENDAPATAN DAERAH]
    B4 --> B4D[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]

    B1A --> B1A1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    B1B --> B1B1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    B1C --> B1C1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    B2A --> B2A1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    B2B --> B2B1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    B2C --> B2C1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    B3A --> B3A1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    B3B --> B3B1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    B3C --> B3C1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    B4A --> B4A1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    B4B --> B4B1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    B4C --> B4C1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    B4D --> B4D1[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]

    B1A1 --> UPT[UPT]
    B1B1 --> UPT
    B1C1 --> UPT
    B2A1 --> UPT
    B2B1 --> UPT
    B2C1 --> UPT
    B3A1 --> UPT
    B3B1 --> UPT
    B3C1 --> UPT
    B4A1 --> UPT
    B4B1 --> UPT
    B4C1 --> UPT
    B4D1 --> UPT
  
```

Sumber: Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021

4.1.5 Tugas dan Fungsi Jabatan BPKPD Kabupaten Kebumen

Berdasar pada Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen. Berikut merupakan tugas dan fungsi BPKPD Kabupaten Kebumen:

a. Kepala Badan

Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

c. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran.

d. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi belanja dan kas Daerah.

e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, penggunaan dan penatausahaan pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah.

f. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan dan evaluasi pendapatan Daerah.

g. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penagihan dan pemeriksaan pendapatan Daerah.

h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi akuntansi, pelaporan dan penunjang urusan keuangan Daerah.

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

4.2 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (*School of Accounting BINUS University, 2025*) statistik deskriptif disajikan untuk memberikan deskripsi atau gambaran umum dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Nilai rata-rata merupakan nilai tengah dari data tersebut. Standar deviasi menunjukkan seberapa besar variasi atau penyimpangan data terhadap nilai rata-rata. Kemudian untuk nilai minimum adalah nilai terkecil dalam suatu variabel selama periode pengamatan, sedangkan untuk nilai maksimum adalah nilai terbesar dari suatu variabel selama periode pengamatan. Berikut merupakan hasil dari statistik deskriptif dalam penelitian ini.

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata	Std. Deviasi	Min.	Maks.	Sumber
Variabel Terikat					
IPM	71,3060	0,89954	70,32	72,48	BPS
Variabel Bebas					
DAK (miliar rupiah)	464,8520	71,39315	386,91	544,03	Pemda dan BPKPD
Variabel Kontrol					
Jumlah Penduduk (juta jiwa)	1,3800	0,02550	1,35	1,41	BPS
Tingkat Kemiskinan (%)	16,7760	0,89916	15,71	17,83	BPS
Sumber: diolah					

Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen memiliki nilai rata-rata sebesar 71,3060 dengan standar deviasi sebesar 0,89954. Nilai minimum IPM sebesar 70,32 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 72,48. Hal tersebut mengindikasikan bahwa IPM di Kabupaten Kebumen relatif stabil selama periode pengamatan yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen memiliki nilai rata-rata sebesar Rp464,85 miliar dengan standar deviasi sebesar Rp71,39 miliar. Nilai minimum DAK sebesar Rp386,91 miliar dan untuk nilai maksimumnya adalah Rp544,03 miliar. Hal tersebut mengindikasikan adanya fluktuasi dalam alokasi dana dari Pemerintah Pusat selama lima tahun terakhir.

Jumlah penduduk sebagai salah satu variabel kontrol memiliki rata-rata sebesar 1,38 juta jiwa dengan standar deviasi yang rendah, yaitu 0,0255. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kebumen tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan selama lima tahun terakhir. Nilai minimum sebesar 1,35 juta jiwa dan nilai maksimumnya sebesar 1,41 juta jiwa.

Tingkat kemiskinan yang juga sebagai variabel kontrol memiliki rata-rata sebesar 16,77% dengan standar deviasi sebesar 0,899%. Nilai minimum tingkat kemiskinan selama periode pengamatan sebesar 15,71% dan nilai maksimumnya sebesar 17,83%. Hal tersebut mengindikasikan adanya perubahan yang cukup moderat pada tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Normalitas merupakan metode statistik yang digunakan untuk memeriksa apakah data terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas digunakan dengan metode Shapiro-Wilk. Data dianggap terdistribusi dengan normal apabila $p\text{-value} > 0,05$. Sebaliknya, jika $p\text{-value} < 0,05$ maka dapat dikatakan jika data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas atas data pada penelitian ini.

Tabel 4. 2 Uji Normalitas

Variabel	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
DAK	0,859	5	0,224
IPM	0,951	5	0,742
Jumlah Penduduk	0,944	5	0,692
Tingkat Kemiskinan	0,905	5	0,438

Sumber: diolah

Berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk pada tabel 4.2 tersebut, menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau probabilitas setiap variabel $> 0,05$. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa seluruh data terdistribusi normal.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai VIF, model regresi dapat dikatakan bebas multikolinearitas jika memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Tabel 4.3 berikut menyajikan hasil uji multikolinearitas pada model regresi penelitian ini.

Tabel 4. 3 Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
DAK	0,005	195,665
Jumlah Penduduk	0,062	16,207
Tingkat Kemiskinan	0,007	136,916

Sumber: diolah

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang mencakup DAK sebagai variabel bebas utama, dan jumlah penduduk serta tingkat kemiskinan sebagai variabel kontrol menghasilkan nilai VIF yang sangat tinggi, yaitu 195,665 untuk DAK, 16,207 untuk jumlah penduduk, dan 136,916 untuk tingkat kemiskinan. Selain nilai VIF yang sangat tinggi tersebut, yaitu masing-masing lebih dari 10, dapat dilihat juga nilai *tolerance* pada masing-masing variabel yang kurang dari 0,10 yang mendeteksi adanya korelasi cukup tinggi antar variabel dan berpotensi mengganggu kestabilan model regresi serta akan membuat estimasi menjadi bias.

Bahkan nilai VIF variabel DAK, yang merupakan variabel bebas utama pada penelitian ini, pun meningkat secara signifikan ketika diuji bersama dua variabel kontrol tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari distorsi atas multikolinearitas serta menjaga validitas model, kedua variabel kontrol tersebut, yaitu jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan dihapus dari model regresi. Dan dengan adanya penghapusan variabel kontrol tersebut, analisis dilanjutkan menggunakan regresi linear sederhana antara DAK dan IPM. Meskipun variabel kontrol dihilangkan, fokus utama penelitian yaitu pada pengaruh DAK terhadap

IPM tetap dapat dianalisis secara tepat dan akurat melalui model regresi linear sederhana.

Setelah kedua variabel kontrol tersebut dihapus dari model regresi, analisis dilanjutkan dengan menggunakan regresi linear sederhana, yaitu hanya dengan satu variabel bebas, DAK. Dalam model analisis regresi linear sederhana, uji multikolinearitas tidak perlu dilakukan, karena multikolinearitas hanya dapat terjadi apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas dalam model analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel bebas. Oleh karena itu, pengujian multikolinearitas tidak dilakukan pada model akhir ini, dan harus dilakukan pengujian ulang pada uji normalitas atas model akhir yang akan digunakan.

4.3.3 Hasil Uji Normalitas Model Akhir

Tabel 4.4 berikut menyajikan hasil uji normalitas pada model akhir yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu antara DAK dan IPM. Pada pengujian tersebut menghasilkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 untuk masing-masing variabel, yaitu 0,742 untuk variabel DAK dan 0,224 untuk variabel IPM. Hal tersebut mengindikasikan bahwa data yang digunakan dalam model akhir terdistribusi normal.

Tabel 4. 4 Uji Normalitas Model Akhir

Variabel	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
DAK	0,951	5	0,742
IPM	0,859	5	0,224

Sumber: diolah

4.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser digunakan untuk menganalisis heteroskedastisitas tersebut, yaitu untuk memeriksa apakah terjadi ketidaksamaan varian residual dalam model regresi. Apabila hasil uji memperoleh nilai $p\text{-value} > 0,05$ dapat dinyatakan bahwa model regresi tersebut tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas dan dikatakan baik. Tabel 4.5 berikut merupakan hasil dari pengujian yang telah dilakukan.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
DAK	1,000

Sumber: diolah

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut, dapat dilihat bahwa pengujian heteroskedastisitas menghasilkan angka signifikansi $1,000 > 0,05$ yang dapat diindikasikan jika data yang digunakan tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas.

4.3.5 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, untuk pengujian model ini menggunakan DW-test. Apabila uji tersebut memperoleh hasil di antara -4 sampai dengan +4, maka dapat dikatakan jika data dalam penelitian bebas dari adanya autokorelasi. Berikut merupakan hasil dari uji autokorelasi dengan DW-test.

Tabel 4. 6 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,962 ^a	,926	,901	,28328	2,637

Sumber: diolah

Berdasarkan tabel 4.6 uji autokorelasi dengan DW-test tersebut, dapat dilihat jika hasil Durbin Watson menunjukkan angka 2,637 yang mengindikasikan jika data yang digunakan bebas dari autokorelasi.

4.4 Analisis Regresi

Pada awalnya, penelitian ini direncanakan menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan satu variabel independen utama, yaitu DAK, dan dua variabel kontrol, yaitu jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan. Namun, berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang sudah dijelaskan pada subbab 4.3.2 hasil uji multikolinearitas menunjukkan adanya gejala multikolinearitas yang kuat. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil analisis yang valid dan menghindari bias data akibat multikolinearitas, model analisis disederhanakan menjadi regresi linear sederhana dengan hanya menggunakan DAK sebagai variabel independen. Berikut merupakan model analisis regresi linear sederhana beserta hasil analisis regresi.

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan:

Y : Variabel Dependen (IPM)

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi Variabel DAK

X : DAK

Tabel 4. 7 *Coefficients*

IPM	Koefisien	t	Sig.
Konstanta (C)	65,671	70,545	<,001
DAK	,012	6,110	,009

Sumber: diolah

Berdasarkan hasil *output* pada tabel 4.7 tersebut, diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 65,671 + 0,012(\text{DAK})$$

Dengan persamaan tersebut, dapat diartikan bahwa setiap kenaikan DAK sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai IPM sebesar 0,012 dengan asumsi faktor lain tetap konstan.

4.5 Hasil Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat berdasarkan dua kriteria yang telah ditetapkan, yaitu jika $p\text{-value} < 0,05$ atau $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$, maka variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 8 Hasil Uji F

	df	F	Sig.
<i>Regression</i>	1	37,333	,009
<i>Residual</i>	3		

Sumber: diolah

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.8 tersebut, diperoleh nilai F hitung sebesar 37,333 dengan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$. Nilai F hitung tersebut lebih besar dari nilai F tabel, yaitu sebesar 10,128. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear sederhana secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM.

4.6 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai R^2 . Jika nilai R^2 mendekati satu, maka variabel independen mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dengan baik. Sebaliknya, jika nilai R^2

mendekati nol, maka variabel independen dinilai kurang efektif dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil dari uji koefisien determinasi pada model penelitian ini.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,962 ^a	,926	,901	,28328

Sumber: diolah

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut, dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,962. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 96,2% variabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kebumen dapat dijelaskan oleh variabel independen Dana Alokasi Khusus. Sementara 3,8% lainnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.7 Pembahasan Hasil Uji Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear sederhana, diperoleh bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kebumen selama periode penelitian, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ dan koefisien regresi positif sebesar 0,012 yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Rp1 miliar pada DAK dapat meningkatkan IPM sebesar 0,012 poin, dengan asumsi variabel lain konstan.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,962 yang menunjukkan bahwa 96,2% variasi dalam IPM dapat dijelaskan oleh variabel DAK. Sisanya sebesar 3,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Uji F juga menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara simultan dengan nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar 37,333 lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel yaitu 10,128. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel DAK dan IPM.

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini diterima, karena berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terindikasi bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kebumen. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Ina & Hudang, 2024). Dalam penelitian tersebut, peningkatan sebesar satu satuan pada DAK berkontribusi terhadap kenaikan IPM sebesar 0,0054 poin. Hal ini dapat memperkuat bukti bahwa DAK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan manusia pada suatu daerah.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh koefisiensi regresi sebesar 0,012 dengan arah positif, yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap IPM beserta indikatornya di Kabupaten Kebumen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Menurut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen, DAK pada sektor kesehatan dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan serta pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, yang berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas layanan, sehingga mendorong peningkatan angka umur harapan hidup sebagai indikator dimensi kesehatan dalam IPM. Pada sektor pendidikan, DAK digunakan untuk pengadaan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan yang akan mendukung peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai indikator pendidikan dalam IPM. Sementara itu, alokasi DAK untuk infrastruktur pembangunan daerah, seperti jalan, irigasi, dan air bersih, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas dan produktivitas, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai indikator dimensi standar hidup layak dalam IPM.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Data yang diperlukan diperoleh dari berbagai sumber, yaitu BPS, BPKPD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Setelah data berhasil diperoleh, penelitian dilakukan dengan beberapa pengujian untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian. Pengujian tersebut berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi, uji secara simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2).

Berdasarkan hasil pengujian data pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kebumen pada periode tahun 2020 hingga 2024. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05, serta dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,012 yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan DAK sebesar Rp1 miliar diperkirakan dapat meningkatkan IPM sebesar 0,012 poin.
2. Nilai koefisien determinasi (R^2) memperoleh hasil sebesar 0,962 yang mengindikasikan bahwa sebesar 96,2% variasi dalam IPM dapat dijelaskan oleh DAK, sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar 3,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.
3. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya di wilayah lain, salah satunya yaitu penelitian di Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAK juga berpengaruh terhadap peningkatan IPM, meskipun dengan nilai koefisien yang lebih kecil, yaitu sebesar 0,0054. Hal ini memperkuat asumsi bahwa DAK merupakan salah satu instrumen

penting dalam mendukung peningkatan pembangunan manusia di suatu daerah.

4. Variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan, tidak dilibatkan dalam model akhir karena adanya indikasi multikolinearitas yang tinggi ketika diuji secara bersamaan. Oleh karena itu, model akhir yang digunakan adalah model analisis regresi linear sederhana dengan satu variabel independen, yaitu DAK.
5. DAK berpengaruh positif terhadap IPM di Kabupaten Kebumen, sebagaimana ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,012. Berdasarkan pemetaan alokasi anggaran, DAK turut berkontribusi terhadap peningkatan masing-masing indikator IPM, yaitu umur harapan hidup melalui sektor kesehatan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah melalui sektor pendidikan, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan melalui pembangunan infrastruktur yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil dan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan data *time series* menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian ini karena rentang waktu yang digunakan hanya mencakup lima tahun, yaitu dari 2020 hingga 2024. Jumlah data yang terbatas dapat memengaruhi ketepatan hasil analisis, terutama dalam pengujian statistik yang akan lebih optimal apabila dilakukan dengan jumlah observasi yang lebih luas.
2. Model penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen utama, yaitu Dana Alokasi Khusus. Hal ini dapat menyebabkan model belum sepenuhnya mampu menggambarkan seluruh faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

3. Keterbatasan ruang lingkup wilayah dan waktu penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan penelitian hanya difokuskan pada Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu tertentu, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke wilayah lain dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda.

Meskipun terdapat beberapa keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini tetap memberikan kontribusi awal dalam memahami hubungan antara DAK dan peningkatan IPM. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dengan cakupan data yang lebih luas.

5.3 Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah data dan variabel yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan data *time series* dengan jangka waktu yang lebih panjang serta mempertimbangkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi IPM. Selain itu, dapat dipertimbangkan pula penggunaan metode analisis yang lebih kompleks agar hasil analisis lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, . . . Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Abdullah, P. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sleman: Aswaja Pressindo.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Arifin, A., & Azizah, S. N. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020). *E-QIEN Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 461-467.
- Azfirmawarman, D., Magriasti, L., & Yulhendri. (2023). Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Kajian Perubahan Metodologi Penghitungan). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 117-125.
- Badan Pusat Statistik. (2024, May 13). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/05/13/8f77e73a66a6f484c655985a/indeks-pembangunan-manusia-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024, November 15). *Produk - Berita Resmi Statistik*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/15/2296/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2024-mencapai-75-02--meningkat-0-63-poin-atau-0-85-persen-dibandingkan-tahun-sebelumnya-yang-sebesar-74-39-.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. (2024, May 30). *Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen*. Retrieved from kebumenkab.bps.go.id: <https://kebumenkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg==/jumlah-penduduk-kabupaten-kebumen.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. (n.d.). *kebumenkab.bps.go.id*. Retrieved from <https://kebumenkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg==/jumlah-penduduk-kabupaten-kebumen.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. (n.d.). *Kemiskinan*. Retrieved from kebumenkab.bps.go.id: <https://kebumenkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwIzI=/kemiskinan.html>

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju Tengah*. BPS Kabupaten Mamuju.
- BPS. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia 2018*. Retrieved from Badan Pusat Statistik:
<https://www.bps.go.id/id/publication/2019/08/27/34432798c6ae95c6751bfbbba/indeks-pem>
- BPS. (2021, April 30). *bps.go.id*. Retrieved from www.bps.go.id:
<https://www.bps.go.id/id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>
- BPS Kebumen. (2024, May 30). *kebumenkab.bps.go.id*. Retrieved from
<https://kebumenkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg==/jumlah-penduduk-kabupaten-kebumen.html>
- Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI. (2022, December 19). Retrieved from Anggaran Kemenkeu: chrome-extension://kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah/<https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/e216fa97-99da-4a54-bdd6-879311816819>
- Fadli, Rosnawintang, & Apoda. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 85-94.
- Fahrurrozi, M., Mohzana, Haritani, H., Yunitasari, D., & Basri, H. (2023). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Regional dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 70-89.
- Fajar, M. (2021). Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Formulasi Baru. *Statistika*, 125-135.
- Fikriansyah, I. (2023, June 6). *Detikpedia*. Retrieved from detikEdu:
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6758599/manfaat-penelitian-pengertian-fungsi-dan-cara-membuatnya>
- Gujarati, D., & Porter, D. (2009). *Basic Econometric*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Haq, M. (1995). *Reflections on Human Development*. Oxford University Press.
- Ina, Y. T., & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 1234-1245.
- Kamarni, N., Ginting, C. Y., & Septya, M. (2022). Dampak Dana Otonomi Khusus dan Dana Perimbangan Terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel

Intervening pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017. *Menara Ilmu*, 60-75.

Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., Oktariani, N., & Noviarita, D. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, II, 113-128. doi:10.24042/revenue.v2i2.9071

Lukito, L. E. (2022). *Kontribusi Industri Pariwisata Terhadap Pembangunan Indek Manusia*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Mankiw, N. (2006). *Principles of Economics* (4th ed.). Thomson South-Western.

Mayapada, R., Yanti, R. W., & Syarifuddin, S. (2022). Analisis Tingkat Kepentingan terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *JOMTA Journal of Mathematics: Theory and Applications*, 45-49.

Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.

Nabila, N. R., Fitri, Y., & Arum, P. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *J Statistika Jurnal Ilmiah Teori dan Aplikasi Statistika*, 424-433.

Nashshar, M. I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 255-270.

Palagan, G. P., Fisher, B., & Darto. (2018). *Analisis Data Statistik Menggunakan SPSS*. Tangerang: Universitas Muhammadiyah Jakarta Press.

Pambudi, A. S. (2021). Optimalisasi Pemanfaatan Big Data dalam Evaluasi On Going DAK Fisik Bidang Kesehatan saat Pandemi COVID-19. *Bappenas Working Papers*, 201-217.

Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Minahasa Tenggara dengan Pengeluaran di Bidang Kesehatan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 132-149.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. (n.d.). *Daftar Dokumen Laporan Realisasi Anggaran*. Retrieved from kebumenkab.go.id: <https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/dokumen/86>

- Pratama, N. S., Hamzani, U., Muhsin, Rusliyawati, & Karpriana, A. P. (2025). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of Innovation in Management, Accounting, and Business*, 16-26.
- Ridho, M. M. (2023). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.
- Rizkiyah, J., & Anitasari, H. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro. *JEMes Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 1-6.
- Rubiyanto, Runtunuwu, P. H., & Husen, A. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1093-1104.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bantul: Penerbit KBM Indonesia.
- Salsabila, & Nurjihadi, M. (2022). Analisis Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia: (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2011-2020). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 12-18. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3073787>
- Saputra, H., Abdiska, D., Ilham, M., & Kamarni, N. (2023). Dampak Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2022. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1522-1535.
- Sari, Y., Winarni, E., & Amali, M. (2021). Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 565-571.
- Saswatata, S. S., & Parju. (2022). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Semarang. *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 17-28.
- School of Accounting BINUS University. (2025). Memahami Nilai Standard Deviation (Standar Deviasi) dalam Penelitian Ilmiah. Jakarta.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. (2021, December 27). Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021. Kebumen.
- Sen, A. K. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

- Sidik, M. (2017, September 22). Retrieved from Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12611/Pengelolaan-Aset-dan-Kebijakan-Fiskal.html#:~:text=Kebijakan%20Fiskal%20adalah%20langkah-langkah%20pemerintah%20mengelola%20pengeluaran%20dan,agar%20memaksimumkan%20kesejahteraan%20ekonomi%20%28Madjid%2C%20>
- Silalahi, S. K., Arief, M., & Indrafana, I. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintahan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 24407-24419.
- Sudarmanto, E., Fidiana, Widiani, I. W., Ernawati, Rahmawati, Y., Nurwahidah, D., . . . Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Publik: Teori dan Praktik Kebijakan Fiskal*. Medan: Yayasan Literasi Sains Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- United Nations Development Programme. (2025). *hdr.undp.org*. Retrieved from undp.org: <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- United Nations Development Programme. (2025). *UNDP Human Development*. Retrieved from UNDP: <https://hdr.undp.org/about/human-development>
- Wati, E. S., Ridwansyah, E., & Dewi, A. K. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2019. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 136-147.

LAMPIRAN

Hasil uji normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Alokasi Khusus	.262	5	.200 [*]	.859	5	.224
Indeks Pembangunan Manusia	.197	5	.200 [*]	.951	5	.742
Jumlah Penduduk	.184	5	.200 [*]	.944	5	.692
Tingkat Kemiskinan	.258	5	.200 [*]	.905	5	.438

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil uji multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	44.758	8.694		5.148	.122		
	Dana Alokasi Khusus	-.015	.007	-1.187	-2.289	.262	.005	195.665
	Jumlah Penduduk	37.945	5.266	1.075	7.206	.088	.062	16.207
	Tingkat Kemiskinan	-1.124	.434	-1.124	-2.591	.234	.007	136.916

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Hasil uji heteroskedastisitas (glejser)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.705E-14	8.694		.000	1.000		
	Dana Alokasi Khusus	.000	.007	.000	.000	1.000	.005	195.665
	Jumlah Penduduk	.000	5.266	.000	.000	1.000	.062	16.207
	Tingkat Kemiskinan	.000	.434	.000	.000	1.000	.007	136.916

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Hasil uji autokorelasi durbin-watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.999	.995	.06669	2.622

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Khusus

b. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Uji regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	44.758	8.694		5.148	.122		
	Dana Alokasi Khusus	-.015	.007	-1.187	-2.289	.262	.005	195.665
	Jumlah Penduduk	37.945	5.266	1.075	7.206	.088	.062	16.207
	Tingkat Kemiskinan	-1.124	.434	-1.124	-2.591	.234	.007	136.916

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Hasil uji secara simultan (uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.232	3	1.077	242.231	.047 ^b
	Residual	.004	1	.004		
	Total	3.237	4			

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Khusus

Hasil uji koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.999	.995	.06669	2.622

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Khusus

b. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMAPI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	REFF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
PENDAPATAN - LRA	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	89.697.000.000,00	100.877.584.517,00	112,46	110.614.568.810,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	23.587.096.000,00	22.068.306.403,00	93,56	27.141.726.792,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	13.243.497.000,00	15.727.758.649,00	118,76	14.210.376.188,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	200.292.986.000,00	264.352.314.214,80	131,98	257.196.761.539,68
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		326.820.579.000,00	403.025.963.783,80	123,32	409.163.433.329,68
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1				
Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	34.205.198.000,00	33.296.897.421,00	97,34	20.809.791.800,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	2.130.728.000,00	1.849.641.537,00	86,81	1.349.316.600,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.3	1.206.245.637.000,00	1.197.504.293.000,00	99,28	1.279.681.428.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.1.4	387.316.381.000,00	391.574.573.136,00	101,10	386.546.619.443,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		1.629.897.944.000,00	1.624.225.405.094,00	99,65	1.688.387.155.843,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

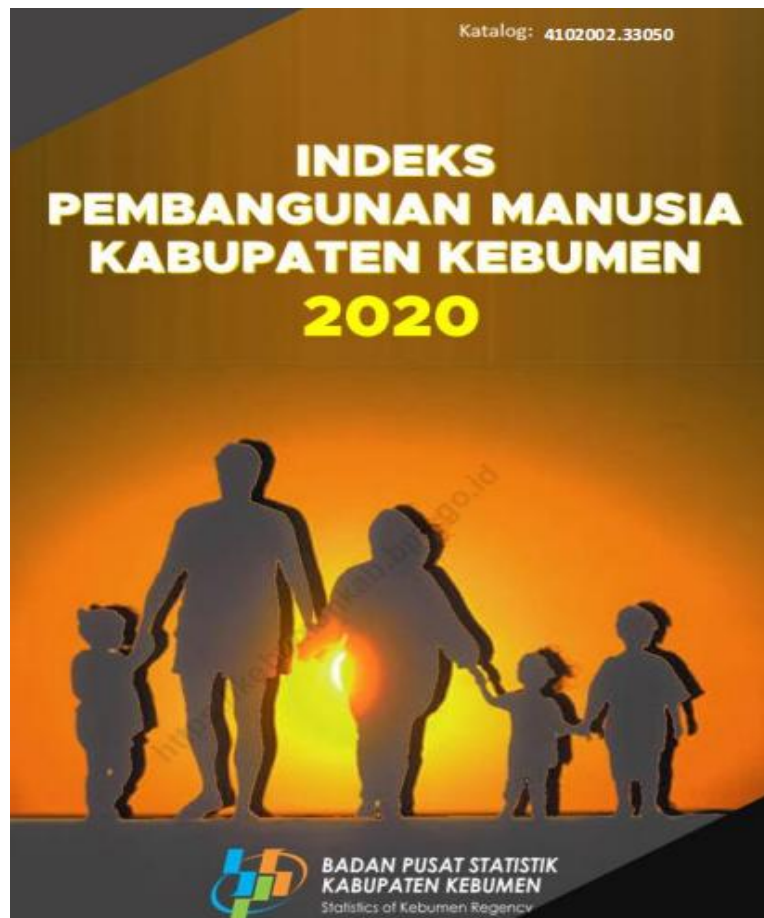
URAIAN	REFF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	121.170.200.000,00	129.843.875.322,00	107,16	112.474.854.190,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	32.501.085.000,00	28.375.110.419,00	87,31	23.652.739.277,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	17.600.000.000,00	17.640.585.052,00	100,23	16.552.860.815,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	269.161.766.000,00	336.486.390.369,00	125,01	319.336.632.833,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		440.433.051.000,00	512.345.961.162,00	116,33	472.017.087.115,00
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	34.516.861.000,00	38.220.093.261,00	110,73	41.397.337.217,00
Dana Alokasi Umum)	5.1.1.2.1.2	1.176.643.410.000,00	1.173.705.068.800,00	99,75	1.179.288.910.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.3	510.113.627.000,00	494.615.159.880,00	96,96	386.912.905.863,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.721.273.898.000,00	1.706.540.321.941,00	99,14	1.607.599.153.080,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	133.030.000.000,00	137.222.705.502,00	103,15	129.843.875.322,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	36.368.440.000,00	28.898.155.929,00	79,46	28.375.110.419,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	19.123.337.000,00	19.123.340.688,00	100,00	17.640.585.052,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	244.299.270.000,00	278.423.869.096,00	113,97	336.486.804.682,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		432.821.047.000,00	463.668.071.215,00	107,13	512.346.375.475,00
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	38.220.089.000,00	36.123.723.591,00	94,52	38.220.093.261,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	1.220.564.022.000,00	1.239.930.914.430,00	101,59	1.173.705.068.800,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.3	507.088.685.000,00	507.128.355.275,00	100,01	494.615.159.880,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.765.872.796.000,00	1.783.182.993.296,00	100,98	1.706.540.321.941,00

Publikasi BPS Kabupaten Kebumen mengenai laporan IPM Kabupaten Kebumen



Surat pengajuan PKL



POLITEKNIK YKPN
Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 44/POLTEK-YKPN/Sekr II/2025
Hal : Permohonan Izin Magang/PKL
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

21 Februari 2025

Kepada : Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan
Daerah Kabupaten Kebumen
Jl. Pahlawan No. 138 Bumirejo, Kebumen

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktik mahasiswa Politeknik YKPN, kami mewajibkan mahasiswa untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Periode pelaksanaan PKL dimulai tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 03 Juli 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang pelaksanaan hal teknis ataupun data yang diperbolehkan, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2022125744	REVITA HAZNA	085879148197

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. Krismanj, M.Sc., Ak., CA.
NIDN.: 0524126102

Kampus:
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax.: (0274) 561591
E-mail: poltekykpn@poltekykpn.ac.id | Website: poltekykpn.ac.id

Surat perizinan magang dari tempat PKL

	PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id
Kebumen, 5 Maret 2025	
Nomor	: 400.14 5.4 / 01779 / 2025
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Izin Magang
Yth. Direktur Politeknik YKPN di Yogyakarta	
Berdasarkan Surat dari Direktur Politeknik YKPN Nomor : 44/POLTEK-YKPN/Sekr.II/2025 tanggal 21 Februari 2025 Hal : Ijin Permohonan Izin Magang/ PKL, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami ijin :	
Nama	: Revita Hazna
NIM	: 2022125744
Program Studi	: D3 Akuntansi
Waktu magang tanggal 10 Maret – 10 Juli 2025.	
Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.	
a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Plt. Sekretaris, Haris Setyawan, S.Kom., M.S.E. Pembina/ IV/a NIP 19811125 200604 1 014	

Kartu Tanda Mahasiswa



Daftar Hadir Bimbingan Tugas Akhir

DAFTAR HADIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.) SEMESTER GENAP TA. 2024/2025

Dosen pembimbing	:	Evi Grediani, Dr., S.E., M.Sc., Ak., C.A., S.A.S.
Nama Mahasiswa	:	REVITA HAZNA
Nomor Mahasiswa	:	2022125744
Tempat PKL	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mhs.
1	Kamis	13 Maret 2025	Pemaparan pedoman penulisan Laporan Tugas Akhir	
2	Senin	24 Maret 2025	Pengajuan topik dan judul Laporan Tugas Akhir	
3	Senin	14 April 2025	Membahas hasil pekerjaan bab 1, revisi	
4	Selasa	6 Mei 2025	Membahas sebagian bab 2, dan hasil revisi bab 1	
5	Rabu	21 Mei 2025	Menyetujui bab 1 dan 2, revisi hasil bab 3	
6	Rabu	4 Juni 2025	Membahas hasil bab 4 dan 5	
7	Rabu	25 Juni 2025	Pemeriksaan hasil final tugas akhir, revisi	
8	Selasa	15 Juli 2025	Persetujuan hasil final tugas akhir dan pengujian plagiasi	

Dosen Pembimbing,


Evi Grediani, Dr., S.E., M.Sc., Ak., C.A., S.A.S.

Wakil Direktur Bidang Akademik,


Dr. Nung Harjanto., S.E., M.A.A.C., Ak., CA

FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2025 . Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama

: Revita Hazna

NIM

: 2022125744

Prodi

: D3 Akuntansi

Judul TA

: Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kebumen

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 9 %.

Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 29/7 2025



TUGAS AKHIR REVITA.doc

ORIGINALITY REPORT

9%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

1%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	anggaran.kemenkeu.go.id Internet Source	4%
2	www.coursehero.com Internet Source	1%
3	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.polinela.ac.id Internet Source	1%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	lib.ibs.ac.id Internet Source	1%
7	itrev.kemenkeu.go.id Internet Source	1%
8	bpkpd.kebumenkab.go.id Internet Source	1%
9	eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%